



Tak Kuorum, Rapat Paripurna Ditunda



RAPAT PARIPURNA: Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 di DPRD Kalbar, Kamis (6/7).

Sidang Lanjutan Tunggu Jadwal Banmus Dewan

PONTIANAK - Rapat Paripurna Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat (7/7) tidak mencukupi kuorum. Meskipun dua kali dijadwalkan, yakni pada Jumat pagi dan siang, tetap saja banyak anggota DPRD Kalbar tak hadir.

Sementara, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan bersama

perangkat OPD sudah duduk di meja sidang di Balaiungsari DPRD Kalbar. Ketidakhadiran sejumlah wakil rakyat ini ditengarai karena berbagai faktor. Rapat pun terpaksa ditunda dan menunggu penjadwalan ulang dari Badan

Sambungan dari halaman 1

Musyawaharah (Banmus) DPRD Kalbar.

Wakil Gubernur, Ria Norsan mengatakan penundaan sidang paripurna kali ini dikarenakan banyak anggota DPRD yang tidak hadir. Meski ada penundaan, ia yakin jadwal kegiatan di pemerintah provinsi tidak akan terganggu. Ia juga mengklaim bahwa hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sejauh ini baik-baik saja. "Hubungannya baik, tak ada masalah," terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kalbar, M Kebing mengatakan, Banmus akan menjadwalkan ulang agenda rapat paripurna tersebut. Penundaan ini pun diyakininya tak akan mengganggu jadwal

kedewanan. Disinggung penyebab ketidakehadiran sejumlah anggota DPRD Kalbar, Kebing mengaku tak tahu-menahu. Dia hanya berharap, agenda sidang paripurna selanjutnya bakal memenuhi kuorum.

Sehari sebelumnya, Pemprov Kalbar, menyampaikan sejumlah capaian pembangunan kepada DPRD Kalbar. Narasi pencapaian tersebut disampaikan Wagub Kalbar, Ria Norsan pada Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, yang digelar oleh DPRD Kalbar, Kamis (6/7). Dalam laporannya, Wagub Ria Norsan menyebutkan posisi pendapatan daerah tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp5,6

triliun, terealisasi sebesar Rp6,1 triliun. "Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp327 miliar," ujarnya. Penurunan terjadi pada pendapatan transfer DAK-Non Fisik yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena di tahun 2022 pemerintah provinsi tidak lagi mencatat realisasi penerimaan dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri dan swasta.

Sementara, PAD yang dianggarkan sebesar Rp2,8 triliun, terealisasi sebesar Rp3,217 triliun. Sedangkan pendapatan transfer yang dianggarkan sebesar Rp2,717 triliun, terealisasi Rp2,826 triliun. Di samping itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dianggarkan sebesar Rp59 mi-

liar terealisasi Rp59 miliar.

Walaupun total pendapatan menurun dibandingkan tahun 2021, yang dikarenakan peralihan pencatatan dana BOS, tapi PAD meningkat tajam dari tahun lalu sebesar Rp710 miliar. Capaian ini menempatkan Pemprov Kalbar sebagai peringkat III kategori peningkatan realisasi PAD Tahun 2022 dan peringkat IV kategori realisasi pendapatan se-provinsi di Indonesia.

Untuk penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp386 miliar, kata Norsan, realisasinya sebesar Rp386 miliar. Kemudian, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50 miliar. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SilPA tercatat sebesar Rp712 miliar. (*den*)